



**BADAN POM RI**

DAFTAR ISI

# LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI JAYAPURA



TAHUN ANGGARAN  
2017

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
KATA PENGANTAR .....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	v
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	1
B. SRUKTUR ORGANISASI .....	2
C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .....	4
D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS .....	5
E. ISU STRATEGIS .....	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	8
A. RENCANA STRATEGIS .....	8
B. PERENCANAAN KINERJA .....	9
C. PENGUKURAN KINERJA .....	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	12
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	12
Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	12
Sasaran Strategis I - Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan .....	12
Sasaran Strategis 2 - Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat .....	22
Sasaran Strategis 3 - Meningkatnya Kualitas Kapasita Kelembagaan BPOM .....	28
B. REALISASI ANGGARAN .....	32
C. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN .....	33
BAB IV. PENUTUP .....	35
A. KESIMPULAN .....	35
B. SARAN .....	36



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Jayapura .....	8
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2017.....	10
Tabel 3.	Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017 .....	12
Tabel 4.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 .....	12
Tabel 5.	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2017.....	13
Tabel 6.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Tahun 2019 dan Target Nasional Tahun 2017 .....	15
Tabel 7.	Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 1 .....	17
Tabel 8.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Tahun 2019 .....	22
Tabel 9.	Capaian Sasaran Strategis 2 .....	23
Tabel 10.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2017 .....	25
Tabel 11.	Capaian Program Kegiatan Sasaran Strategis 2 Tahun 2017 .....	26
Tabel 12.	Capaian Sasaran Strategis 3 .....	28
Tabel 13.	Capaian Program Kegiatan Sasaran Strategis 3 Tahun 2017 .....	30
Tabel 14.	Realisasi Anggaran Tahun 2017 Berdasarkan Sasaran Strategis .....	32
Tabel 15.	Realisasi Anggaran Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Belanja .....	32



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi BBPOM di Jayapura .....	2
Gambar 2.	Komposisi Pegawai BBPOM di Jayapura .....	3
Gambar 3.	Diagram Permasalahan dan Isu Strategis di BBPOM di Jayapura .....	7
Gambar 4.	Perbandingan Persentase Capaian Komoditi Yang Memenuhi Syarat .....	16
Gambar 5.	Komposisi Sampel yang di Sampling Tahun 2017 .....	18
Gambar 6.	Perbandingan Jumlah Sampel yang Diuji menggunakan Parameter Kritis .....	18
Gambar 7.	Perbandingan Persentase Pemenuhan Target Sampling Produk Obat Di Sektor Publik (IFK) Tahun 2015 – 2017 .....	19
Gambar 8.	Perbandingan Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat Dan Makanan Tahun 2015 – 2017 .....	20
Gambar 9.	Perbandingan Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Tahun 2015 – 2017 .....	21
Gambar 10.	Perbandingan Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2015 – 2017 .....	21
Gambar 11.	Perbandingan Tingkat Kepuasan Pelanggan dari Tahun 2017 – 2019 .....	24
Gambar 12.	Perbandingan Jumlah Kab/Kota yang Memberikan Komitmen Untuk Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2015 – 2017 .....	25
Gambar 13.	Perbandingan Jumlah Layanan Pengujian Pihak Ketiga yang Dilakukan dari Tahun 2015 – 2017 .....	27
Gambar 14.	Perbandingan Jumlah Komnitas yang Diberdayakan dari Tahun 2015 – 2017 .....	28
Gambar 15.	Perbandingan Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dari Tahun 2015 – 2017 .....	31
Gambar 16.	Perbandingan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu dari Tahun 2015 – 2017 .....	31



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tahun 2017 disusun sebagai wujud pelaksanaan penyelenggaraan negara yang akuntabel dan transparan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan ini Kami mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kewenangan pengelolaan sumberdaya, dan pelaksanaan kebijakan BBPOM di Jayapura selama tahun 2017.

Kami sadari bahwa tugas dan tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh BBPOM di Jayapura semakin luas dan kompleks. Oleh karena itu BBPOM di Jayapura senantiasa menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan dinas/instansi terkait agar fungsi pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tujuan utama Kami adalah masyarakat sebagai konsumen akan merasa terlindungi oleh Badan POM RI dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Jayapura kepada organisasi induk yaitu Badan POM RI dan sebagai evaluasi capaian kinerja BBPOM di Jayapura dalam melakukan perbaikan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Badan POM RI.

Jayapura, 15 Februari 2018

Kepala Balai Besar POM di Jayapura



Dra. Mudi Yunita Bukit, Apt.

NIP.19660614 199803 2 001



## RINGKASAN EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2017 ini meliputi informasi tentang Pengukuran Kinerja selama Tahun 2017 berkaitan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada Renstra BBPOM di Jayapura 2015-2019, telah ditetapkan 3 sasaran strategis yang tingkat pencapaiannya telah ditetapkan, dan untuk tahun 2015 pencapaian sasaran untuk 3 (Tiga) sasaran strategis yaitu (1) Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (2) Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat (3) Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM. Berdasarkan pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa semua sasaran kinerja BBPOM di Jayapura terlaksana dengan efisien

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	101.11
	2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	98.95
	3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	102.17
	4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	97.73
	5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	99.65
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	114.35
	2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	100,00
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM dari Badan POM	89.95



Dari segi penggunaan anggaran, jumlah anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya kelima sasaran strategis yaitu sebesar Rp. 24.347.295.504 dari total anggaran yang telah disiapkan yaitu sebesar Rp. 26.470.307.000 atau sekitar **91.98%**

Jayapura, 15 Februari 2018

Kepala Balai Besar POM di Jayapura



Dra. Mudi Yunita Bukit, Apt.

NIP.19660614 199803 2 001



## BAB I PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Balai Besar POM di Jayapura (BBPOM di Jayapura) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM RI) yang berada di Provinsi Papua. Badan POM merupakan sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK). Tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001.

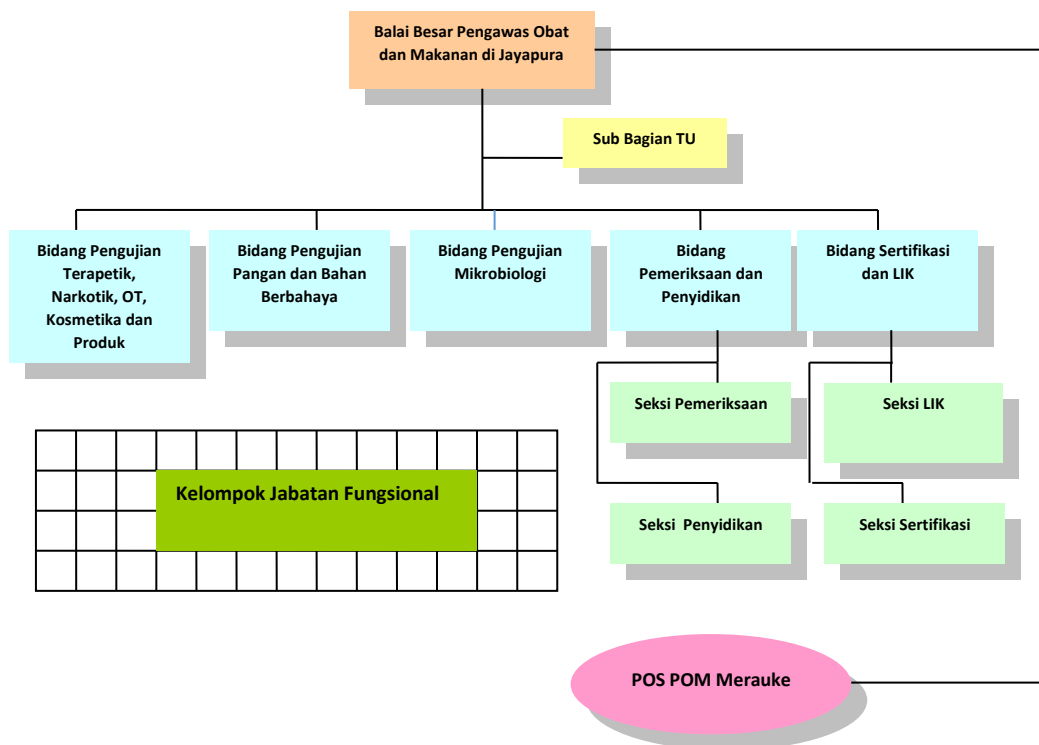
Melalui keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, telah ditetapkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan POM terdiri dari Balai Besar POM dan Balai POM. BBPOM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Daerah dengan *cathment area* Provinsi Papua. Penyelenggaraan upaya pengawasan Obat dan Makanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan standar sarana dan produk, penilaian produk yang didaftarkan (diregistrasi), pengambilan contoh produk di lapangan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengujian laboratorium dari contoh produk yang diambil di lapangan, hingga ke investigasi awal dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan cara produksi dan distribusi, maupun pengedaran produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku yang harus diawasi oleh BBPOM di Jayapura khususnya Provinsi Papua dengan luas wilayah yang dimiliki kurang lebih 420.540 km<sup>2</sup> dan pembagian wilayah yang terdiri dari 1 kota dan 28 kabupaten.

Sejak tahun 2015 BBPOM di Jayapura telah menugaskan pegawai tetap yang bertugas di Pos POM Merauke dimana wilayah kerja Pos POM merauke meliputi 4 kabupaten yaitu Kab. Merauke, Kab. Bovendigul, Kab. Mappi dan Kab. Asmat



## B. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor05018/SK/KBPOM Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPOM di Jayapura dilakukan oleh bidang-bidang dan Sub Bagian Tata Usaha yang tergambar sesuai Struktur Organisasi Balai Besar POM di bawah ini :



Gambar 1 . Struktur Organisasi BBPOM di Jayapura



**Tugas BBPOM di Jayapura sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan POM**

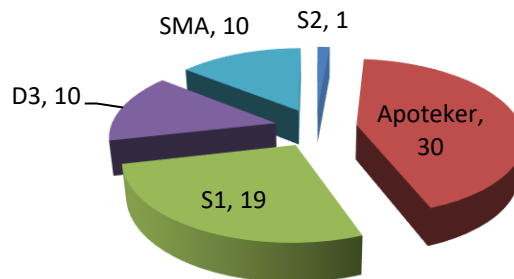
melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya

## FUNGSI :

- Penyusunan rencana dan program pengawasan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian, dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika zat aditif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya
- Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi
- Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
- Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum
- Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen
- Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan
- Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BBPOM di Jayapura di dukung oleh 70 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

## Komposisi Pegawai BBPOM di Jayapura tahun 2017



Gambar 2. Komposisi Pegawai BBPOM di Jayapura



**C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan produk baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh BBPOM di Jayapura sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/ keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat (BKO) pada obat tradisional dan penggunaan bahan berbahaya (BB) pada produksi makanan dan kosmetika.

Era globalisasi/ perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember tahun 2015 menyebabkan gempuran produk-produk luar ke dalam negeri semakin menuntut kesiapan masyarakat untuk bijak dalam memilih produk-produk yang aman untuk di konsumsi. Untuk itu BBPOM di Jayapura perlu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat secara intensif melalui penyebaran informasi kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk yang aman bagi kesehatan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat/ konsumen dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak terdaftar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada jalur yang tidak resmi



membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat perlu diawasi oleh BBPOM di Jayapura.

Di dalam mendukung program kerja Badan POM RI, BBPOM di Jayapura melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan program kerja BBPOM di Jayapura. Meningkatkan kerjasama dalam bentuk MoU dengan pemda setempat serta melakukan advokasi aktif terhadap masyarakat mengenai pentingnya menggunakan produk yang aman dan berkhasiat. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peredaran produk yang aman dan berkhasiat juga turut membantu program kerja BBPOM di Jayapura

#### **D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS**

Dalam melakukan tugas dan fungsinya BBPOM di Jayapura dipengaruhi oleh 2 faktor lingkungan strategis yaitu :

##### **a. Lingkungan Internal**

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBPOM di Jayapura telah didukung oleh ketersediaan SDM yang kompeten hanya saja masih sangat minim dalam hal jumlah personil dimana dengan *catchment area* sebanyak 29 kabupaten/kota BBPOM di Jayapura hanya di dukung oleh personil sebanyak 70 orang. Hal ini sedikit mempengaruhi optimalisasi kinerja BBPOM di Jayapura di dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas. Selain itu BBPOM di Jayapura juga telah berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang program kerja BBPOM di Jayapura seperti peningkatan jumlah peralatan penunjang laboratorium maupun peningkatan kompetensi SDM. Hal lain juga mempengaruhi kinerja dari BBPOM di Jayapura adalah jumlah anggaran yang belum memadai dalam mendukung kinerja BBPOM di Jayapura. Dari 29 kab/kota yang menjadi cakupan wilayah kerja BBPOM di Jayapura, hanya 4 kab/kota yang mampu di tembus melalui transportasi darat sedangkan sisanya hanya dapat ditempuh melalui transportasi udara



**b. Lingkungan eksternal**

Kondisi wilayah Provinsi Papua yang sebagian besar merupakan wilayah pegunungan cukup mempengaruhi kinerja BBPOM di Jayapura dalam melakukan pengawasan. Kondisi keamanan yang belum optimal serta wilayah yang sulit dijangkau menyebabkan BBPOM di Jayapura belum mampu untuk melakukan pengawasan secara optimal dan menyeluruh. Masalah transportasi juga sangat mempengaruhi kemampuan petugas dalam menjangkau daerah-daerah tertentu.

Jumlah SDM yang tidak berimbang dengan jumlah sarana produksi dan distribusi serta produk yang diawasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Jayapura.

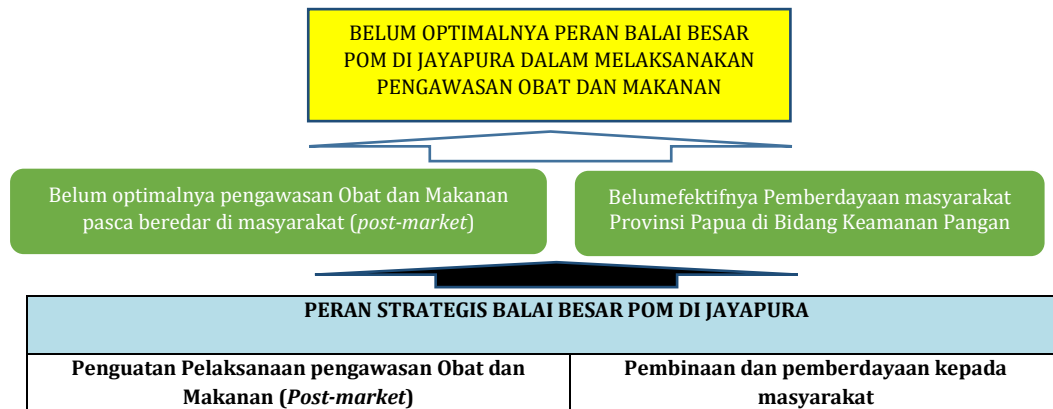
**E. ISU STRATEGIS**

Selama periode 2015-2017, pelaksanaan peran dan fungsi BBPOM di Jayapura tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, antara lain:

- (1) Belum optimalnya pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) dengan masih ditemukannya produk-produk yang tidak memenuhi syarat seperti produk tanpa izin edar (TIE) dan produk-produk kadaluarsa dan
- (2) Belum efektifnya pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa penyebab yang dianggap sangat krusial dan strategis bagi peran BBPOM di Jayapura dalam melakukan pembenahan di masa mendatang, sehingga diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal. Pada gambar di bawah ini terdapat diagram yang menunjukkan analisa permasalahan pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan tupoksi dan kewenangan BBPOM di Jayapura sebagai berikut:





**Gambar 3. Diagram permasalahan dan isu strategis di Balai Besar POM di Jayapura**

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas BBPOM di Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Provinsi Papua masih perlu untuk terus melakukan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen sumber daya manusianya, agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, mutu serta khasiat/manfaat Obat dan Makanan tersebut, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat.

Untuk itu, ada 2 (dua) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi BBPOM di Jayapura sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yang perlu terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang sebagai berikut:

1. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*)
2. Pemberdayaan masyarakat Provinsi Papua dalam memilih produk-produk yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan diri dan keluarganya



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) disusun secara periodik untuk untuk jangka waktu lima tahun dan merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

BBPOM di Jayapura, sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2015-2019. Proses penyusunan Renstra BBPOM di Jayapura tahun 2015-2019 dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2010-2014. Selanjutnya Renstra BBPOM di Jayapura periode 2015-2019 diharapkan dapat meningkatkan kinerja Balai Besar POM di Jayapura dibandingkan dengan pencapaian dari periode sebelumnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

**Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Jayapura**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa	Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	Meningkatnya jaminan Produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase obat yang memenuhi syarat;</li> <li>2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat;</li> <li>3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat;</li> <li>4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat;</li> <li>5. Persentase makanan yang memenuhi syarat.</li> </ol>



	Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan	Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar Lokal dan Global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi	Meningkatnya Kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi Masyarakat	1. Tingkat kepuasan masyarakat 2. Jumlah kabupaten/ kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM		Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	1. Nilai SAKIP Balai Besar POM di Jayapura dari BPOM.



Indikator Kinerja Utamanya (IKU) adalah :

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat
3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
6. Tingkat Kepuasan Masyarakat

**B. PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2017 tertuang di dalam Perjanjian Kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2017, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di Jayapura sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala BBPOM di Jayapura) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja BBPOM di Jayapura Tahun 2017 dituangkan dalam



Pernyataan Perjanjian Kinerja Nomor **OR. 03.01.110.01.17.001** tanggal 6 Januari 2017

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2017**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	98.14
		2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	84.00
		3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	96.00
		4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	99.20
		5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	92.60
2.	<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</b>	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	85
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan	14
3.	<b>Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM</b>	Nilai SAKIP dari BPOM	A
<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>			
1.	<b>Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar</b>	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2500
		2. Pemenuhan target sampling produk obat disektor publik (IFK)	100
2.	<b>Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar</b>	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	38
3.	<b>Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar</b>	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	53
4.	<b>Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan</b>	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	10
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>			
1.	<b>Meningkatnya kerjasama komunikasi, informasi dan edukasi</b>	1. Jumlah layanan publik BB/BPOM	184
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	29
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM</b>			
1.	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan</b>	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	75
2.	<b>Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu</b>	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

**Kegiatan :**

Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Jayapura

**Anggaran**

**Rp. 29.159.358.000**



Anggaran kegiatan sebesar **Rp. 29.159.358.000,-** sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BBPOM di Jayapura, dan seiring dengan berjalannya waktu telah mengalami revisi DIPA. Anggaran terakhir yang dikelola sebesar Rp. 26.470.307.000

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau kinerja dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu telah dibuat Rencana Aksi Perjanjian Kinerja triwulan, sehingga capaian kinerja dapat dimonitor dan dievaluasi tiap tiga bulan.

### C. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah perbandingan antara kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan (target kinerja). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian perhitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia.

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja terdiri dari 2 macam tergantung pada angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Polarisasi *Maximize* yaitu apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Polarisasi *Minimize* Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{100 - \text{realisasi}}{100 - \text{target}} \times 100\%$$

Adapun status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

MEMUASKAN	BAIK	CUKUP	KURANG	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
100% < X ≤ 125%	100%	75% ≤ X < 100%	X < 75%	X > 125%



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara singkat capaian sasaran strategis BBPOM di Jayapura adalah sebagai berikut

**Tabel 3. Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017**

No.	Sasaran Strategis	Nilai Capaian Sasaran (%)	Kriteria
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	99,9	Cukup
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	112,67	Memuaskan
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Jayapura	100,19	Memuaskan

Sedangkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017**

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase obat yang memenuhi syarat	98.14	99.23	101,11
2	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	84.00	83.12	98.95
3	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	96.00	98.08	102.17
4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	99.20	96.95	97.73
5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	92.60	92.28	99.65
6.	Tingkat kepuasan masyarakat	85.0	97.2	114.35

### Analisis Akuntabilitas Kinerja (Penjelasan Capaian Sasaran Strategis)

#### Sasaran Strategis I – Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

##### Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 5 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran



strategis pertama ini. Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2016**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	98.14	99.23	101,11	Memuaskan
	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	84.00	83.12	98.95	Cukup
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	96.00	98.08	102.17	Memuaskan
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	99.20	96.95	97.73	Cukup
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	92.60	92.28	99.65	Cukup

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut :

**1. Persentase obat yang memenuhi syarat**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi atas target persentase obat yang memenuhi syarat adalah sebesar 99,23 % dari target sebesar 98.14%. Hal ini didasarkan pada jumlah sampel obat yang memenuhi syarat yang diuji menggunakan parameter kritis dibandingkan dengan jumlah sampel obat yang disampling berdasarkan Pedoman Sampling tahun 2017. Jumlah obat yang di sampling pada tahun 2017 adalah sebanyak 518 sampel diantaranya 511 sampel di uji di Balai Besar POM di Jayapura, 3 sampel vaksin di uji di PPOMN dan 4 sampel rokok diuji di PPOMN. Selain itu BBPOM di Jayapura juga menerima sampel rujukan sebanyak 8 sampel dari Balai POM di Manokwari, BBPOM di Manado, Balai POM di Ambon dan BBPOM di Banjarmasin

Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap sampel yang di sampling, 4 sampel tidak memenuhi persyaratan mutu. Dengan demikian capaian indikator persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 101.11%.

**2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi atas target persentase obat tradisional yang memenuhi syarat adalah sebesar 83.12% dari target sebesar



84.00%. Hal ini didasarkan pada jumlah sampel obat yang memenuhi syarat yang diuji menggunakan parameter kritis dibandingkan dengan jumlah sampel obat tradisional yang disampling berdasarkan Pedoman Sampling tahun 2017. Jumlah obat tradisional yang di sampling pada tahun 2017 adalah sebanyak 391 sampel. Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap sampel yang di sampling, 66 sampel tidak memenuhi syarat terdiri dari 64 sampel tidak memenuhi syarat secara mikrobiologi dan 2 sampel TMS BKO (Bahan Kimia Obat) yaitu 1 sampel mengandung sildenafil sitrat, 1 sampel mengandung teofilin. Dengan demikian capaian indikator persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 98.95%.

### **3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi atas target persentase kosmetik yang memenuhi syarat adalah sebesar 98.08% dari target sebesar 96.00%. Hal ini didasarkan pada jumlah sampel kosmetik yang memenuhi syarat yang diuji menggunakan parameter kritis dibandingkan dengan jumlah sampel kosmetik yang disampling berdasarkan Pedoman Sampling tahun 2017. Jumlah kosmetik yang di sampling pada tahun 2017 adalah sebanyak 781 sampel.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap sampel yang di sampling, 15 sampel tidak memenuhi syarat terdiri dari 4 sampel TMS mutu fisika (pH) dan 6 sampel TMS mutu kimia antara lain 1 sampel TMS PK pengawet, 5 sampel TMS PK methanol dan etanol serta 5 sampel TMS bahan berbahaya antara lain 1 sampel mengandung logam berat raksa (Hg), 2 sampel mengandung tretinoin, 1 sampel mengandung steroid dexamethasone dan 1 sampel mengandung hidrokuinon . Dengan demikian capaian indikator persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 102.17 %.

### **4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi atas target persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat adalah sebesar 96.95 % dari target sebesar 99,20%. Hal ini didasarkan pada jumlah sampel suplemen kesehatan yang memenuhi syarat yang diuji menggunakan parameter kritis. Jumlah suplemen kesehatan yang di sampling pada tahun 2017 adalah sebanyak 131 sampel.



Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap sampel yang di sampling, 4 sampel tidak memenuhi syarat terdiri dari 4 sampel TMS mutu. Dengan demikian capaian indikator persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 97.73%.

#### 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat

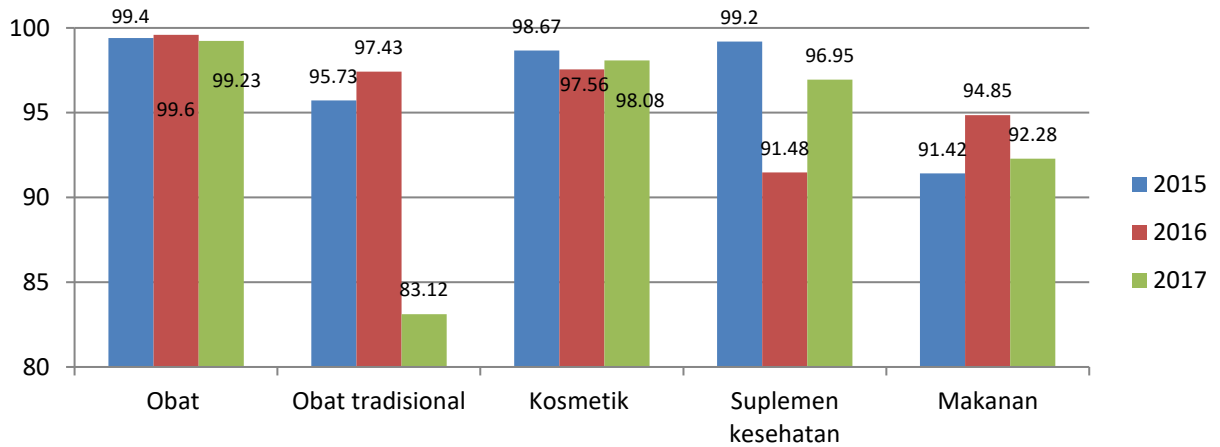
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi atas target persentase makanan yang memenuhi syarat adalah sebesar 92.28% dari target sebesar 92.60%. Hal ini didasarkan pada jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat yang diuji menggunakan parameter kritis. Jumlah makanan yang di sampling pada tahun 2017 adalah sebanyak 777 sampel yang terdiri dari 550 sampel dengan ijin edar dari BPOM, 58 sampel dengan ijin PIRT, 144 sampel pangan yang tidak terdaftar, dan 25 sampel kemasan pangan.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap sampel yang di sampling, 58 sampel tidak memenuhi syarat mutu terdiri dari 32 sampel dengan ijin edar dari BPOM, 19 sampel dengan ijin PIRT dan 7 sampel pangan yang tidak terdaftar. Dengan demikian capaian indikator persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 99.65%.

**Tabel 6. Perbandingan capaian kinerja tahun 2017 terhadap target tahun 2019 dan Target Nasional Tahun 2017**

NO	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Target 2019	% Capaian	Target Nasional	% Capaian
1	Persentase obat yang memenuhi syarat	99.23	99,00	100,23	93,00	106.70
2	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	83.12	85,00	97.79	82,00	101.37
3	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	98.08	97,00	101.11	91,00	107.78
4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	96.95	99,50	97.44	81,00	119.69
5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	92.28	93,10	99.12	89,10	103.57





**Gambar 4. Perbandingan Persentase capaian komoditi yang memenuhi syarat**

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan dari tahun lalu terhadap persentase produk yang memenuhi syarat pada komoditi obat, obat tradisional dan makanan. Sedangkan pada komoditi kosmetik dan suplemen kesehatan terjadi kenaikan persentase produk yang memenuhi syarat.

Trend peningkatan persentase komoditi yang memenuhi syarat di atas tidak terlepas dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh BBPOM di Jayapura diantaranya kegiatan pengawasan yang intensif terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pembinaan kepada para pelaku usaha, advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait yang di tuangkan dan MoU, penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan untuk menimbulkan efek jera kepada para pelaku pelanggaran serta aktif melakukan edukasi kepada masyarakat dalam memilih produk-produk yang aman bagi kesehatan masyarakat.

Untuk memperbaiki capaian yang belum optimal, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih intensif lagi. Edukasi dan advokasi kepada para pemangku kepentingan perlu lebih ditingkatkan lagi. Selain itu peran aktif dari para *stakeholder* juga sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari organisasi

**Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan**

**Tabel 7. Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis I**



Sasaran Strategis	Sasaran kegiatan	Indikator	Target 2017	Capaian 2017	% Capaian
Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2500	2598	103,92
		Pemenuhan target sampling produk obat disektor publik (IFK)	100	100	100
	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	38	38	100
	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi syarat	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	53	53	100
	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	10	10	100

**Sasaran kegiatan : Meningkatkan kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar**

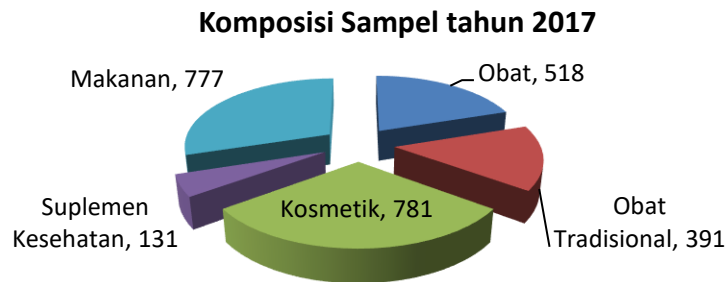
**Indikator :**

**1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis**

Parameter uji kritis adalah parameter uji yang ditetapkan berdasarkan kajian risiko mutu dan keamanan yang dapat berpengaruh langsung pada kesehatan dengan mempertimbangkan bentuk sediaan dan sifat kimia fisika zat aktif. Parameter uji kritis telah ditetapkan dalam pedoman sampling Badan POM tahun 2017.

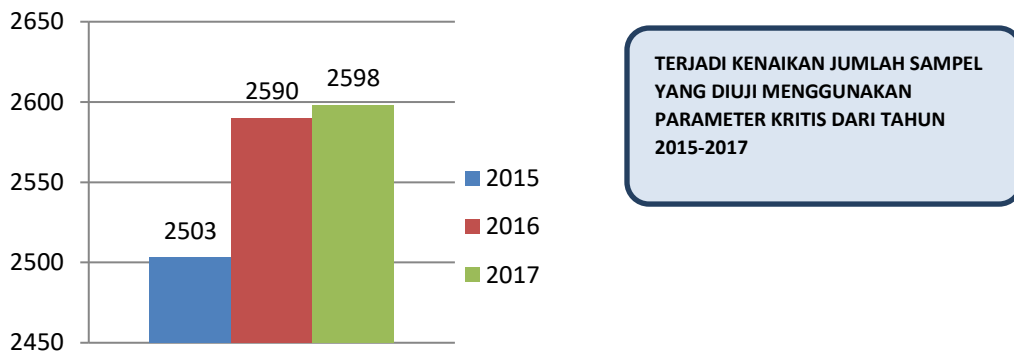
Strategi sampling dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko antara lain dengan mengintegrasikan hasil pengawasan mulai dari temuan inspeksi sarana produksi, sarana distribusi serta analisis trend hasil sampling dan pengujian. Pada tahun 2017 telah diuji sebanyak 2598 sampel dengan target sampel sebanyak 2500 sampel sehingga persentase capaian sebesar 103,92%. Sampel tersebut disampling di sarana distribusi obat dan makanan, pelayanan kesehatan dan secara *online* khusus untuk sampel kosmetika dan obat tradisional.





**Gambar 5. Komposisi sampel yang di sampling tahun 2017**

Pendukung keberhasilan pengambilan sampling sesuai target adalah pemantauan secara berkala jumlah sampel yang telah disampling dan berpedoman pada renlak yang telah dibuat berdasarkan petunjuk teknis prioritas sampling dari Badan POM serta didukung dengan SDM yang kompeten



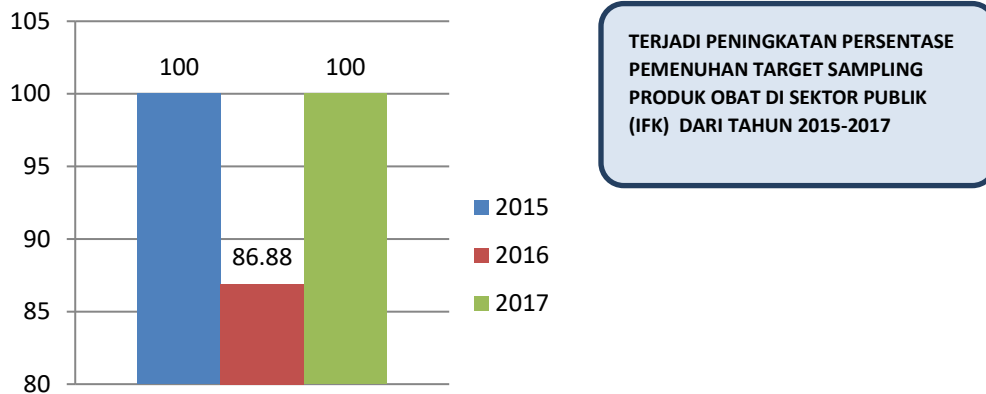
**Gambar 6. Perbandingan Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis tahun 2015-2017**

**2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)**

Sampling merupakan salah satu kegiatan pengawasan *postmarket*, untuk memonitor konsistensi mutu obat diperedaran. Sampling di sektor publik ini dilakukan karena masyarakat banyak menggunakan obat disektor publik misalnya obat di puskesmas, di rumah sakit dan klinik milik pemerintah sehingga obat yang berada di sektor publik harus diprioritaskan untuk di awasi mutu, keamanan dan khasiatnya.

Target Sampling produk obat di sektor publik sebanyak 432 sampel. Jumlah sampel yang bisa di sampling sebanyak 432 sampel atau sebesar 100%.





**Gambar 7. Perbandingan persentase pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK) tahun 2015-2017**

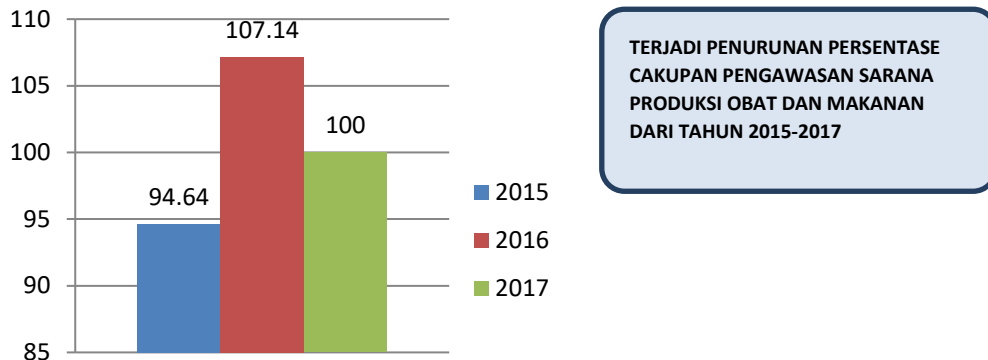
**Sasaran kegiatan : Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar**

**Indikator :**

**Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan**

Jumlah sarana produksi yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura sebanyak 203 sarana yang terdiri dari 23 sarana MD dan 180 sarana P-IRT. Target pemeriksaan sarana produksi tahun 2017 sebanyak 70 sarana yang terdiri dari 23 sarana MD dan 47 sarana P-IRT. Realisasi jumlah sarana produksi yang diperiksa sebanyak 70 sarana terdiri dari 22 sarana MD dan 48 sarana P-IRT . Realisasi jumlah sarana produksi MD yang diperiksa berbeda dengan jumlah sarana yang ada dikarenakan terdapat 1 sarana produksi MD yang sudah tidak berproduksi lagi. Sehingga capaian jumlah sarana produksi yang di awasi sebesar 100 %. Bila dibandingkan dengan taun 2016, persentase cakupan pengawasan di tahun 2017 menurun, namun hal ini dikarenakan target pengawasan lebih ditekankan pada peningkatan kualitas pengawasan.





**Gambar 8. Perbandingan persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan tahun 2015-2017**

**Sasaran kegiatan : Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar**

**Indikator :**

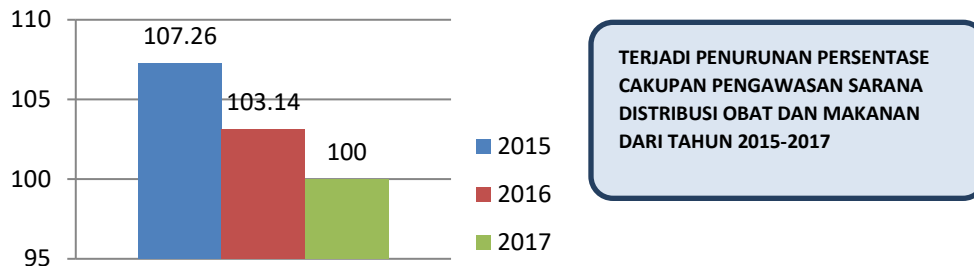
**Persentase cakupan pengawasan sarana Distribusi Obat dan makanan**

Pengawasan sarana distribusi obat dan makanan, meliputi pengawasan disarana Pedagang Besar Farmasi, di Gudang Farmasi Kabupaten/Kota, di Toko Obat, di sarana distribusi obat tradisional, seperti depot jamu, di sarana distribusi kosmetik meliputi toko kosmetik, salon kecantikan, distributor kosmetik dan klinik kecantikan, di distribusi bahan berbahaya, agen atau distributor pangan, pengecer pangan seperti toko pangan dan swalayan. Jumlah sarana distribusi obat dan makanan di wilayah Papua sebanyak 2850 sarana dan yang diperiksa tahun 2017 sebanyak 1510 sarana, sehingga persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan tahun 2017 sebesar 53% yang memenuhi target cakupan pengawasan di sarana distribusi obat dan makanan sesuai renstra tahun 2017 sebesar 53%. Nilai pencapaian indikator kegiatan 100%, dan masuk dalam kriteria baik.

Faktor keberhasilan dalam pencapaian cakupan pengawasan didukung data sarana yang *diupdate* tiap tahun dan pemilihan sarana distribusi yang diinspeksi berdasarkan analisis resiko. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan pencapaian hasil yang memuaskan adalah melakukan kerja sama dengan lintas sektor terkait, *mengupdate* data sarana setiap tahun dan melakukan pemeriksaan sarana distribusi yang pemilihannya berdasar analisis resiko serta meningkatkan kompetensi petugas



pengawas di sarana distribusi dengan cara mengikuti pelatihan eksternal maupun internal Balai



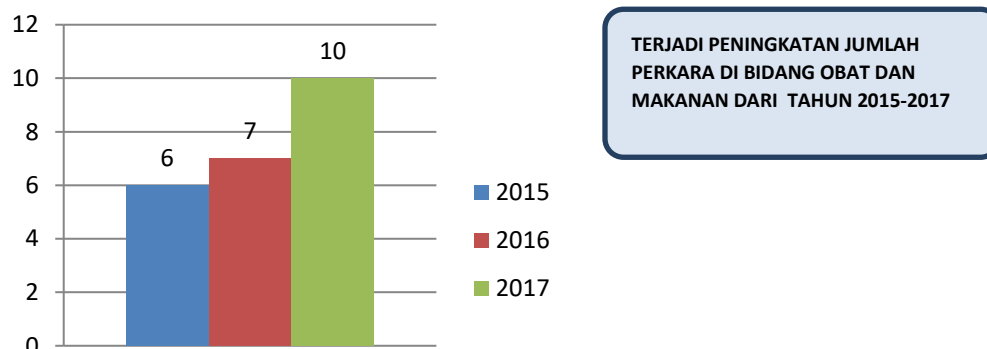
**Gambar 9. Perbandingan persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan tahun 2015-2017**

**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya hasil tindak lanjut Penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan makanan**

**Indikator :**

**Jumlah Perkara di Bidang Obat dan makanan**

Untuk perkara di bidang obat dan makanan, jumlah kasus pro justica yang dikerjakan oleh Tim Penyidik BBPOM di Jayapura sebanyak 20 kasus, namun yang mampu diterbitkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan)nya hanya sebanyak 7 perkara. Hal ini disebabkan karena 7 perkara lainnya merupakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan 6 lainnya hanya merupakan pelanggaran administratif. Target pada Perjanjian Kinerja adalah sebanyak 9 perkara namun berdasarkan Surat Pernyataan Sekretaris Utama Badan POM RI nomor KU.02.04.2.21.09.16 tanggal 9 september 2016 telah disetujui perubahan target perkara yaitu menjadi 7 perkara pada tahun 2016 sehingga persentase capaian menjadi 100%.



**Gambar 10. Perbandingan jumlah perkara di bidang obat dan makanan tahun 2015-2017**

Capaian program-program diatas memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap menurunnya tindak pidana di bidang obat dan makanan. Namun walaupun dari capaian cakupan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang di awasi oleh BBPOM di Jayapura mencapai target namun masih ditemukan sarana yang tidak memenuhi ketentuan yang cukup banyak sehingga ini menjadi tantangan tersendiri untuk Balai Besar POM di Jayapura untuk tidak hanya mencapai target jumlah sarana yang di awasi namun juga meningkatkan kualitas pengawasan dengan sasaran adalah sarana yang memenuhi ketentuan. Diharapkan bahwa target ini akan tercapai di tahun 2019 sebagai akhir dari program jangka menengah Balai Besar POM di Jayapura.

**Tabel 8. Perbandingan capaian kinerja tahun 2017 terhadap target tahun 2019**

NO	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Target 2019	% Capaian
1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2598	2500	103,92
2	Pemenuhan target sampling produk obat disektor publik (IFK)	100	100	100
3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	38	42	90.48
4.	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	53	55	96.36
5.	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	10	11	90.91

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian tahun 2017 belum mencapai target akhir periode Renstra Balai Besar POM di Jayapura yaitu target pada tahun 2019 terutama untuk target jumlah perkara dan pemenuhan persentase cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi produk obat dan makanan sehingga diperlukan strategi dan upaya yang tepat untuk bisa mencapai target tersebut

### **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu



kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik. Kerjasama yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Jayapura selama ini lebih banyak dengan unsur pemerintah serta masih bersifat sporadik, parsial dan belum dilakukan dengan program yang terukur dan sistematis. Padahal keterlibatan berbagai pihak termasuk masyarakat sangat urgen dan strategis dalam menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi mandat Balai Besar POM di Jayapura sebagai UPT Badan POM

**Tabel 9. Capaian Sasaran Strategis 2**

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Tingkat kepuasan masyarakat	85	97.20	114.35	Memuaskan
2.	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	14	14	100.00	Baik

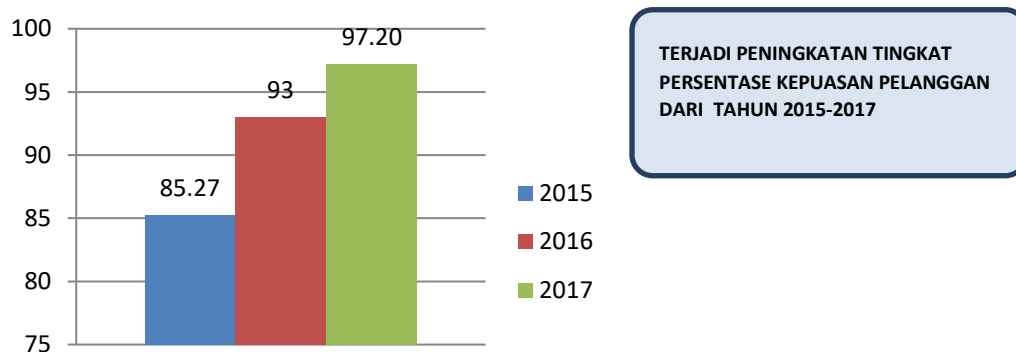
### 1. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Survei kepuasan pelanggan adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. (PermenPAN RB No. 16 Tahun 2014)

Dari hasil evaluasi tingkat kepuasan masyarakat yang dilakukan dapat dilihat bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Jayapura sudah memenuhi harapan baik pihak ketiga sebagai pengguna layanan maupun Balai Besar POM di Jayapura sebagai pemberi layanan. Pelayanan Balai Besar POM di Jayapura sebagai penyedia layanan publik telah memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan sehingga mampu



meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Balai Besar POM di jayapura.



**Gambar 11. Perbandingan tingkat kepuasan pelanggan dari tahun 2015-2016**

**2. Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan**

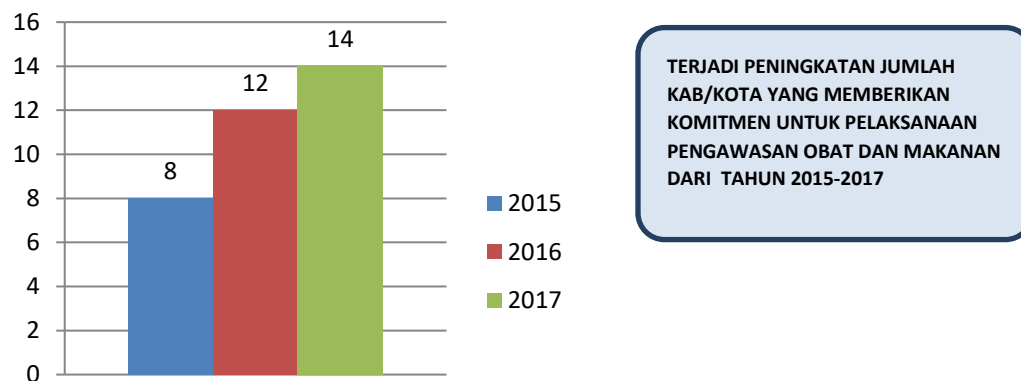
Selain itu, semakin meningkatnya kepedulian para *Stakeholder* pada keamanan produk obat dan makanan yang beredar di wilayah mereka menyebabkan beberapa *Stakeholder* yang ada di wilayah kerja BBPOM di Jayapura bersedia mengalokasikan anggaran untuk mendukung program pengawasan obat dan makanan BBPOM di Jayapura di Provinsi Papua. Hal ini juga merupakan salah satu Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis kedua dari Renstra 2015-2019 BBPOM di Jayapura dimana BBPOM di Jayapura telah menargetkan bahwa akan ada *Stakeholder* yang mau mengalokasikan anggarannya untuk mendukung Program dari BBPOM di Jayapura. Dari tabel capaian di atas dapat dilihat bahwa ada 14 kab/kota yang telah bersedia mengalokasikan anggarannya yaitu :

1. Provinsi Papua
2. Kota Jayapura
3. Kabupaten Jayapura
4. Kabupaten Biak Numfor
5. Kabupaten Supiori
6. Kabupaten Yapen
7. Kabupaten Merauke



8. Kabupaten Jayawijaya
9. Kabupaten Keerom
10. Kabupaten Mimika
11. Kabupaten Nabire
12. Kabupaten Paniai
13. Kabupaten Sarmi
14. Kabupaten Dogiyai

Diharapkan dengan bersedianya kab/kota tersebut untuk mengalokasikan anggaran dalam mendukung program pengawasan obat dan makanan di Provinsi Papua maka angka pelanggaran di bidang obat dan makanan di Provinsi Papua dapat menurun secara signifikan dan mampu memberikan jaminan keamanan terhadap obat dan makanan yang berbahaya



Gambar 12. Perbandingan jumlah Kab/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan tahun 2015-2017

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2017

NO	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2019	% Capaian
1.	Tingkat kepuasan masyarakat	97.20	95	102.31
2.	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan	14	20	70.00



Makanan			
---------	--	--	--

**Indikator Kinerja Kegiatan**

Program-program yang dilakukan untuk mendukung sasaran strategis yang kedua ini antara lain :

**Tabel 11. Capaian Program Kegiatan Sasaran Strategis 2 Tahun 2017**

No	Program	Target 2017	Capaian 2017	% Capaian
1.	Jumlah layanan publik BB/BPOM	184	184	100,00
2.	Jumlah komunitas yang diberdayakan	29	29	100,00

**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)****Indikator :****1. Jumlah Layanan Publik**

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah layanan publik yang dilaksanakan oleh BBPOM di Jayapura telah mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2017. Hal ini merupakan dampak dari semakin dikenalnya institusi Badan POM RI di kalangan masyarakat luas sehingga juga berdampak pada keberadaan BBPOM di Jayapura sebagai UPT dari Badan POM RI di Provinsi Papua. Harapan dan keinginan masyarakat untuk memperoleh produk obat dan makanan yang aman menjadikan masyarakat semakin paham dan waspada terhadap produk-produk yang beredar di wilayah provinsi Papua. Selain itu harapan dari *Stakeholder* kepada Badan POM juga ikut andil dalam meningkatnya permintaan pengujian oleh pihak ketiga.

Jenis layanan yang dilakukan oleh BBPOM di Jayapura yaitu :

**a. Layanan Informasi**

Kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap jumlah layanan informasi berupa : talkshow 3 layanan, pameran 2 layanan, penyebaran informasi 17 layanan, SIKER (Sentra Informasi Keracunan) 23 layanan, Operasional Laboratorium



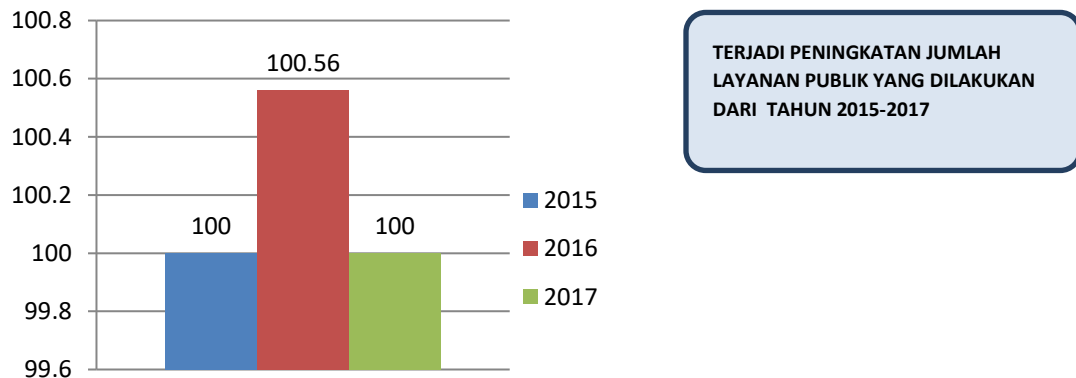
Keliling dalam rangka PJAS dan Pengawasan GKPD 31 layanan, layanan informasi dan pengaduan secara langsung, email maupun telepon (117 layanan) yang sebagian besar berisi pertanyaan tentang proses registrasi dan proses pengujian pihak ketiga

**b. Layanan Sertifikasi**

Kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap jumlah layanan sertifikasi berupa : audit sarana dalam rangka sertifikasi, labelisasi Halal dan surveilan sebanyak 26 surat hasil audit/rekomendasi yang terdiri dari 8 sarana AMDK, 14 sarana PBF, dan 4 sarana P-IRT

**c. Layanan Pengujian Pihak Ketiga**

Selama tahun 2017, BBPOM di Jayapura telah menerima 356 sampel dari pihak ketiga yang terdiri dari sampel obat, napza dan pangan.



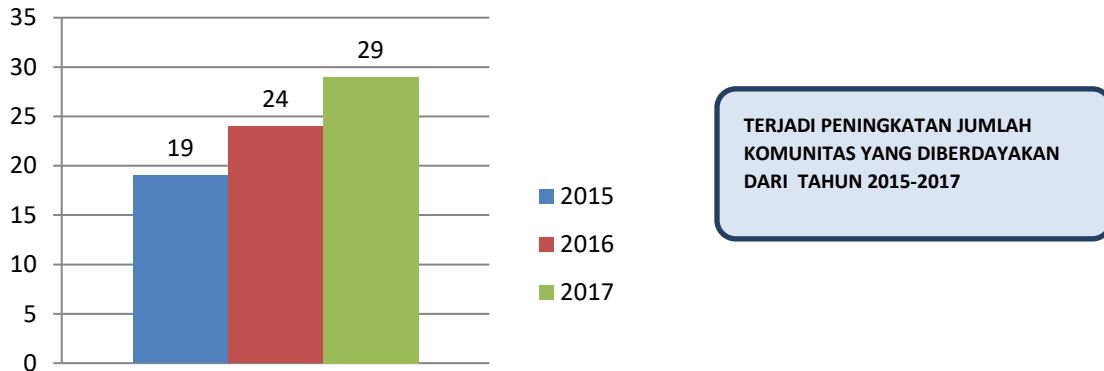
**Gambar 13. Perbandingan jumlah layanan publik yang dilakukan dari tahun 2015-2017**

**2. Jumlah komunitas yang diberdayakan**

Jumlah komunitas yang diberdayakan hingga tahun 2017 adalah sebanyak 29 komunitas yang terdiri dari 4 sekolah, 6 pasar dan 19 desa. Peningkatan jumlah komunitas yang diberdayakan pada tahun 2017 menjadi 29 jumlah komunitas pada tahun 2016 sebanyak 24 komunitas juga memberikan andil yang sangat baik dalam program pengawasan obat dan makanan BBPOM di Jayapura. Dengan meningkatnya jumlah komunitas yang diberdayakan, diharapkan masyarakat mampu untuk melindungi diri dan keluarga dan lingkungan sekitar dari obat dan makanan yang



beresiko terhadap kesehatan. BBPOM di Jayapura berharap bahwa dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas komunitas yang diberdayakan diharapkan bisa memutus mata rantai penyebaran obat dan makanan yang berbahaya karena berkurangnya permintaan (*demand*) dari masyarakat sebagai pengguna dan sumber penghasilan dari pihak-pihak yang mengambil untung dari bisnis ilegal ini.



Gambar 14. Perbandingan jumlah komunitas yang diberdayakan dari tahun 2015-2016

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM**

Pada Sasaran strategis ketiga ini yang menjadi indikator adalah nilai SAKIP BBPOM di Jayapura dari Badan POM RI yaitu :

Tabel 12. Capaian Sasaran Strategis 3 Tahun 2017

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Nilai SAKIP BBPOM dari BPOM	A (80.01)	BB (71.97)	89.95	Cukup

**1. Nilai SAKIP Balai Besar POM di Jayapura oleh Badan POM**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja dari instansi pemerintah, meliputi perencanaan strategis, pelaksanaan dan monitoring, sehingga Implementasi SAKIP merupakan salah satu area perubahan reformasi birokrasi.

Nilai SAKIP BBPOM di Jayapura merupakan indikator kinerja dari sasaran strategis "Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Jayapura", dengan



target tahun 2017 adalah A dan nilai yang diberikan oleh Inspektorat Badan POM adalah BB (71.97). Sehingga capaian indikatornya adalah sebesar 89.95% maka nilai pencapaian sasarnya sama dengan nilai pencapaian indikatornya (89.95%).

Dari nilai tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tahun 2017 BBPOM di Jayapura belum berhasil meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaannya. Sehingga BBPOM di Jayapura harus terus melakukan langkah terobosan dalam upaya meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan. Peningkatan kualitas kapasitas kelembagaan yang dilakukan diantaranya :

1. Peningkatan kompetensi SDM dengan melakukan Reformasi Birokrasi untuk memperkuat loyalitas dan integritas SDM serta dengan peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan, bimtek dan sosialisasi.
2. Dibentuknya satgas SPIP dan dilakukannya audit internal oleh Satgas SPIP tentang pengendalian proses kegiatan

Untuk meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Jayapura" diperlukan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kegiatan dan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar.

Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar di setiap Balai sangat penting untuk mendukung pengawasan obat dan makanan yang efektif dan efisien sebagai bagian dari peningkatan kualitas kelembagaan. Siklus SAKIP dimulai sejak perencanaan strategis, perencanaan kinerja, rencana kerja dan anggaran, DIPA, perjanjian kinerja hingga evaluasi dan pelaporan kinerja tepat waktu. Untuk itu, indikator "Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan" merupakan dukungan pencapaian indikator dari sasaran strategis 3 yaitu nilai SAKIP Balai Besar POM di Jayapura



**Tabel 13. Capaian Program Kegiatan Sasaran Strategis 3 Tahun 2017**

No	Program	Target 2017	Capaian 2017	% Capaian
1.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	75	75	100,00
2.	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100,00

**Sasaran Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan**

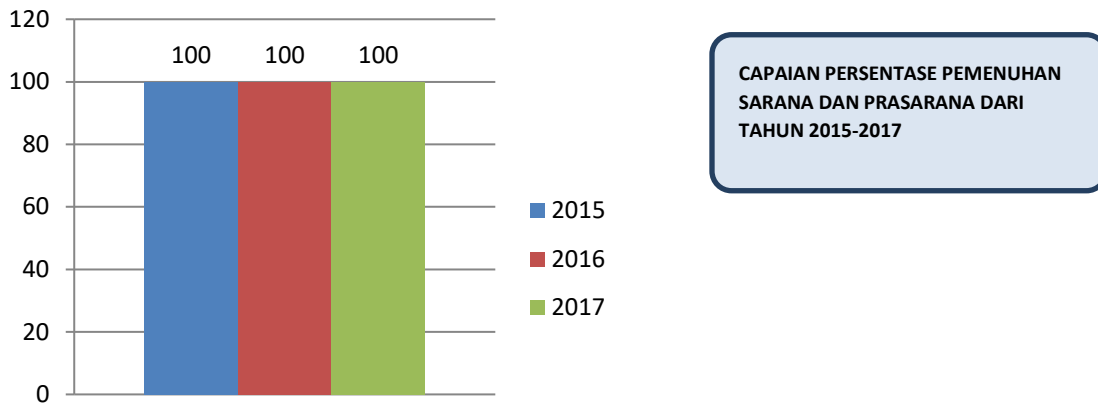
**Indikator :**

**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar**

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 70% dari target sebesar 70% sehingga persen capaian menjadi 100%. Hal ini didukung oleh pengadaan sarana dan prasarana pendukung baik laboratorium maupun perkantoran pada tahun 2016. Pemenuhan sarana dan prasarana ini diharapkan mampu menjadi salah satu faktor pendorong pemenuhan terhadap target pengawasan obat dan makanan di BBPOM di Jayapura kedepan dan tidak lagi menjadi hambatan yang berarti bagi kinerja BBPOM di Jayapura.

Selain pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, BBPOM di Jayapura juga berusaha untuk meningkatkan kapasitas kompetensi SDM yang dimiliki melalui berbagai pelatihan dan workshop sehingga mampu menghasilkan SDM yang kompeten untuk mengawal pencapaian target pengawasan obat dan makanan.





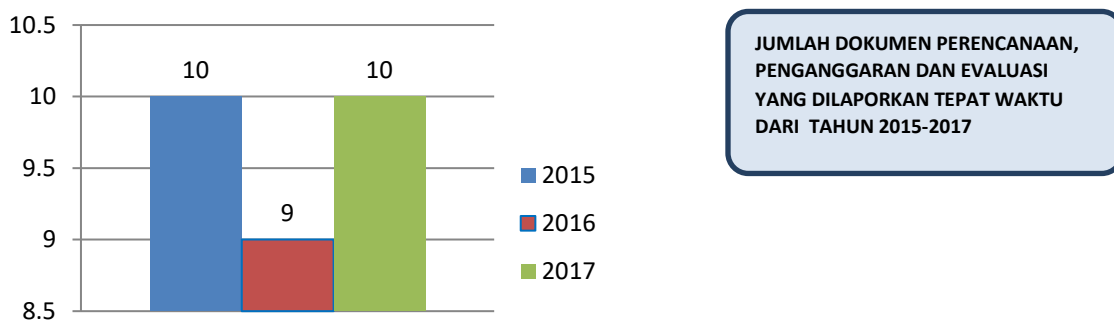
**Gambar 15. Perbandingan persentase pemenuhan sarana dan prasarana dari tahun 2015-2017**

**Sasaran Kegiatan : Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu**

**Indikator :**

**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu**

Jumlah dokumen yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2017 sebanyak 10 dokumen yaitu Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, RKAKL/DIPA tahun 2017, Laporan Kinerja Tahun 2016, Laporan Triwulan I, Laporan Triwulan II, Laporan Triwulan III, Laporan Tahunan 2016, Laporan Keuangan tahun 2016, Laporan Keuangan Semester I Tahun 2017 dan Review RENSTRA 2015-2019.



**Gambar 16. Perbandingan jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu dari tahun 2015-2017**



**B. REALISASI ANGGARAN**

Dalam pelaksanaan program maupun kegiatan-kegiatan pendukung tercapainya visi dan misi BBPOM di Jayapura dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Untuk itu diperlukan evaluasi capaian terhadap alokasi dan penggunaan anggaran kegiatan pendukung. Realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 14. Realisasi Anggaran Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	PAGU	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 9.827.708.000	Rp 8.613.549.442	87.65
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Rp 2.809.647.000	Rp 2.655.358.271	94.51
3.	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Rp 13.832.952.000	Rp 13.078.388.191	94.55
TOTAL		Rp 26.470.307.000	Rp. 24.347.295.504	91.98

Realisasi anggaran BBPOM di Jayapura pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari sebesar 91,41% pada tahun 2016 menjadi sebesar 91,98% pada tahun 2017.



**C. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN**

Dalam pengukuran efisiensi digunakan indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

**Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien**



Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dengan menggunakan rumus di atas dapat dilihat bahwa semua program atau kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM di Jayapura memberikan hasil yang efisien dimana semua program atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPOM di Jayapura tidak ada yang mempunyai nilai efisiensi yang negatif.

Diharapkan bahwa hasil ini akan semakin baik di masa yang akan datang dimana semua program atau kegiatan yang telah direncanakan oleh BBPOM di Jayapura bisa dilakukan dengan efisien dan efektif



## BAB IV PENUTUP



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBPOM di Jayapura Tahun 2017 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi melalui pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yang sepenuhnya mengacu pada Badan POM dan pencapaian realisasi anggaran.

Berdasarkan hasil perhitungan capaian sasaran, pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2017 dapat dicapai secara maksimal. Capaian kinerja organisasi sesuai 3 sasaran strategis yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis "Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan", Nilai Pencapaian Sasaran 99,96 %, dengan kriteria cukup
2. Sasaran strategis "Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat", Nilai Pencapaian Sasaran 112,67 %, dengan kriteria memuaskan
3. Sasaran strategis "Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Jayapura", Nilai Pencapaian Sasaran 100,19%, dengan kriteria memuaskan

Realisasi anggaran pada tahun 2017 berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa dari 15 kegiatan pendukung yang dilaksanakan, semua kegiatan memperlihatkan nilai efisiensi yang positif. Realisasi pelaksanaan anggaran Balai Besar POM di Jayapura adalah 91,98% yaitu sebesar Rp. 24.347.295.504 dari total Pagu DIPA sebesar Rp. 26.470.307.000



**B. SARAN**

Sehubungan dengan capaian kinerja tersebut, BBPOM di Jayapura terus melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan demi peningkatan kinerja BBPOM di Jayapura untuk masa mendatang :

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan konsisten agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan secara efisien.
2. Melakukan peningkatan pengawasan pada produk-produk Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi syarat
3. Melakukan review dan penyesuaian target pada Renstra maupun dokumen perencanaan lainnya untuk tahun 2017 berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2017.



Lampiran 1

**RENCANA STRATEGIS  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA  
TAHUN 2015 - 2019**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Baseline	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura</b>									
	<b>SS 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>								Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar / Balai POM
	1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi Papua	99.00	97.28	97.70	98.14	98.57	99.00	
	1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Papua	82.14	83.00	83.50	84.00	84.50	85.00	
	1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Papua	95.67	95.00	95.50	96.00	96.50	97.00	
	1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Papua	99.44	99.00	99.10	99.20	99.30	99.50	
	1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Papua	93.11	91.50	91.90	92.60	92.90	93.10	
	<b>SS 2 Meningkatnya kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat</b>								
	2.1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Papua	NA	75	80	85	90	95	
	2.2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Papua	NA	8	11	14	17	20	
	<b>SS 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM</b>								
	3.1. Nilai SAKIP BBPOM dari Badan POM	Provinsi Papua	B	B	BB	A	A	A	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Baseline	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>									
	<b>SP 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>								
	1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi Papua	99.00	97.28	97.70	98.14	98.57	99.00	
	1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Papua	82.14	83.00	83.50	84.00	84.50	85.00	
	1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Papua	95.67	95.00	95.50	96.00	96.50	97.00	
	1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Papua	99.44	99.00	99.10	99.20	99.30	99.50	
	1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Papua	93.11	91.50	91.90	92.60	92.90	93.10	
	<b>SP 2 Meningkatnya kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat</b>								
	2.1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Papua	NA	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	
	2.2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Papua	NA	8	11	14	17	20	
	<b>SP 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM</b>								
	3.1. Nilai SAKIP BBPOM dari Badan POM	Provinsi Papua	B	B	BB	A	A	A	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Baseline	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM Jayapura</b>									
	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia								
	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Provinsi Papua	3000	2500	2500	2500	2500	2500	
	2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	Provinsi Papua	100	100	100	100	100	100	
	3. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Provinsi Papua	34	34	36	38	40	42	
	4. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Provinsi Papua	50	51	51	53	53	55	
	5. Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	Provinsi Papua	8	8	9	10	11	11	
	6. Jumlah layanan publik BB/BPOM	Provinsi Papua	167	167	178	184	190	197	
	7. Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Provinsi Papua	13	19	24	29	34	39	
	8. Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Provinsi Papua	70	70	70	75	75	80	
	9. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Provinsi Papua	8	10	9	10	9	10	

## Lampiran 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
BALAI BESAR POM DI JAYAPURA

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	98.14
		2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	84.00
		3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	96.00
		4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	99.20
		5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	92.60
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	85
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan	14
3.	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari BPOM	A
<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>			
1.	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	3. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2500
		4. Pemenuhan target sampling produk obat disektor publik (IFK)	100
2.	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	38
3.	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	53



4.	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	10
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1.	Meningkatnya kerjasama komunikasi, informasi dan edukasi	3. Jumlah layanan publik BB/BPOM	184
		4. Jumlah komunitas yang diberdayakan	29
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM			
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	75
2.	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

**Kegiatan**

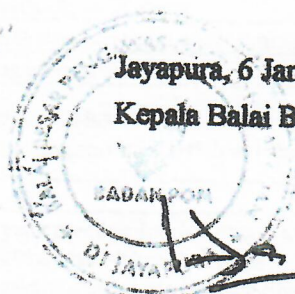
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Jayapura

**Anggaran**

Rp. 29.159.358.000,-

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P  
NIP. 19631109 199003 2 001



Jayapura, 6 Januari 2017

Kepala Balai Besar POM di Jayapura

Drs. H.G. Kakerissa, Apt  
NIP. 19620815 198803 1 001



Lampiran 3

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA**

**UNIT ORGANISASI : BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA**  
**TAHUN ANGGARAN : 2017**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target 2017
<b>Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura</b>		
	<b>SS 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>	
	1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat	98.14
	1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	84.00
	1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	96.00
	1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	99.20
	1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	92.60
	<b>SS 2 Meningkatnya kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat</b>	
	2.1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	85
	2.2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	14
	<b>SS 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM</b>	
3.1. Nilai SAKIP BBPOM dari Badan POM	A	
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>		
	<b>SP 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>	
	1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat	98.14
	1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	84.00
	1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	96.00
	1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	99.20
	1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	92.60
	<b>SP 2 Meningkatnya kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat</b>	
	2.1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	85
	2.2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	14
	<b>SP 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM</b>	
3.1. Nilai SAKIP BBPOM dari Badan POM	A	
<b>Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM Jayapura</b>		
	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target 2017
	1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2500
	2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100
	3 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	38
	4 Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	53
	5 Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	10
	6 Jumlah layanan publik BB/BPOM	184
	7 Jumlah Komunitas yang diberdayakan	29
	8 Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	75
	9 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Lampiran 4

**PENGUKURAN KINERJA  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA**

**UNIT ORGANISASI : BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA**

**TAHUN ANGGARAN : 2017**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target	Realisasi	%	
		2016	2016		
<b>Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura</b>					
	<b>SS 1</b>	<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>			
	1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	98.14	99.23	101.11
	1.2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	84.00	83.12	98.95
	1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	96.00	98.08	102.17
	1.4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	99.20	96.95	97.73
	1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	92.60	92.28	99.65
	<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat</b>			
	2.1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	85	97.20	114.35
	2.2.	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	14	14	100.00
	<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM</b>			
	3.1.	Nilai SAKIP BBPOM dari Badan POM	A (80.01)	BB (71.97)	89.95

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target	Realisasi	%	
		2016	2016		
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>					
	<b>SP 1</b>	<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>			
	1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	98.14	99.23	101.11
	1.2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	84.00	83.12	98.95
	1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	96.00	98.08	102.17
	1.4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	99.20	96.95	97.73
	1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	92.60	92.28	99.65
	<b>SP 2</b>	<b>Meningkatnya kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat</b>			
	2.1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	85	97.20	114.35
	2.2.	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	11	12	109.09
	<b>SP 3</b>	<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM</b>			
	3.1.	Nilai SAKIP BBPOM dari Badan POM	A (80.01)	BB (71.97)	89.95

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target	Realisasi	%
		2016	2016	
<b>Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM Jayapura</b>				
	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia			
	1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2500	2598	103.92
	2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100	100.00	100.00
	3 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	38	38.00	100.00
	4 Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	53	53.00	100.00
	5 Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	10	10	100.00
	6 Jumlah layanan publik BB/BPOM	184	184	100.00
	7 Jumlah Komunitas yang diberdayakan	29	29	100.00
	8 Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	75	75	100.00
	9 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100.00

**Jumlah Anggaran Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Jayapura**  
**Realisasi Anggaran Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Jayapura**

**: Rp. 26.470.307.000 ,-**

**: Rp. 24.347.295.504,-**

Lampiran 5

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA**

**UNIT ORGANISASI : BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA**  
**TAHUN ANGGARAN : 2017**

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		PAGU	REALISASI	%
			Input	Output			
Menguatnya Pengawasan Obat dan Makanan	1.	Sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter uji kritis	bat	: Dana	Rp 31,188,000	Rp 14,142,840	45.35
			Output	: Sampel	31	31	100.00
	2.	Perkara Dibidang Penyidikan Obat dan Makanan	Input	: Dana	Rp 895,914,000	Rp 651,034,600	72.67
			Output	: Kasus Pro Justica	10	10	100.00
	3.	Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter uji kritis	bat	: Dana	Rp 721,932,000	Rp 552,037,109	76.47
			Output	: Sampel	777	777	100.00
	4.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa	Input	: Dana	Rp 93,000,000	Rp 90,605,700	97.43
			Output	: Sarana yang diperiksa	70	70	100.00
	5.	Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa	Input	: Dana	Rp 1,403,563,000	Rp 1,249,029,031	88.99
			Output	: Sarana yang diperiksa	1,510	1,510	100.00
6.	Sampel Obat yang diuji menggunakan parameter uji kritis	Input	: Dana	Rp 1,022,481,000	Rp 906,752,254	88.68	
		Output	: Sampel yang diuji	1,790	1,790	100.00	
7.	Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan yang ditangani	Input	: Dana	Rp 247,795,000	Rp 183,036,061	73.87	
		Output	: Laporan yang dihasilkan	1	1	100.00	
8.	Laporan Kegiatan Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium yang Dilaksanakan	Input	: Dana	Rp1,544,135,000	Rp1,371,375,447	88.81	
		Output	: Dokumen yang dihasilkan	1	1	100.00	
9.	Alat Laboratorium yang Diadakan	Input	: Dana	Rp 3,867,700,000	Rp 3,595,536,400	92.96	
		Output	: Jumlah alat yang diadakan	29	29	100.00	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>Rp 9,827,708,000</b>	<b>Rp 8,613,549,442</b>	<b>87.65</b>
Meningkatnya kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat	1.	Layanan publik BB/BPOM	Input	: Dana	Rp 2,028,552,000	Rp 1,931,688,771	95.23
			Output	: Layanan publik yang dilakukan	184	184	100.00
	2.	Komunitas yang diberdayakan	Input	: Dana	Rp 781,095,000	Rp 723,669,500	92.65
			Output	: Desa yang Diintervensi	29	29	100.00
<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>Rp 2,809,647,000</b>	<b>Rp 2,655,358,271</b>	<b>94.51</b>

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		PAGU	REALISASI	%	
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1.	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dihasilkan	Input	: Dana	Rp 3,322,164,000	Rp 3,159,378,040	95.10	
			Output	: Dokumen yang dihasilkan	10	10	100.00	
	2.	Layanan Internal (overhead)	Input	: Dana	505371000	438100402	86.69	
			Output	: Layanan yang dilakukan	1	1	100.00	
	3.	Layanan Perkantoran	Input	: Dana	Rp 7,526,204,000	Rp 7,402,000,749	98.35	
			Output	: Bulan Layanan	12	12	100.00	
	4.	Gedung/Bangunan	Input	: Dana	Rp 419,760,000	Rp 419,090,000	99.84	
			Output	: Luas Bangunan yang Direnovasi (m <sup>2</sup> )	144	144	100.00	
	5.	Sarana dan Prasarana sesuai standar	Input	: Dana	Rp 2,059,453,000	Rp 1,659,819,000	80.60	
			Output	: Sarana	1	1	100.00	
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>Rp 13,832,952,000</b>	<b>Rp 13,078,388,191</b>	<b>94.55</b>

Lampiran 6

**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA**

**UNIT ORGANISASI : BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA**  
**TAHUN ANGGARAN : 2017**

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		Rata-rata persentase		IE	SE	Kategori	TE
			Input	Output				
Menguatnya Pengawasan Obat dan Makanan	1.	Sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter uji kritis	45.35	100.00	2.21	1	Efisien	1.21
	2.	Perkara Dibidang Penyidikan Obat dan Makanan	72.67	100.00	1.38	1	Efisien	0.38
	3.	Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter uji kritis	76.47	100.00	1.31	1	Efisien	0.31
	4.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa	97.43	100.00	1.03	1	Efisien	0.03
	5.	Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa	88.99	100.00	1.12	1	Efisien	0.12
	6.	Sampel Obat yang diuji menggunakan parameter uji kritis	88.68	100.00	1.13	1	Efisien	0.13
	7.	Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan yang ditangani	73.87	100.00	1.35	1	Efisien	0.35
	8.	Laporan Kegiatan Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium yang Dilaksanakan	88.81	100.00	1.13	1	Efisien	0.13
	9.	Alat Laboratorium yang Diadakan	92.96	100.00	1.08	1	Efisien	0.08
Meningkatnya kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat	1.	Layanan publik BB/BPOM	95.23	100.00	1.05	1	Efisien	0.05
	2.	Komunitas yang diberdayakan	92.65	100.00	1.08	1	Efisien	0.08
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1.	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dihasilkan	95.10	100.00	1.11	1	Efisien	0.11
	2.	Layanan Internal (overhead)	86.69	100.00	1.15	1	Efisien	0.15
	3.	Layanan Perkantoran	98.35	100.00	1.02	1	Efisien	0.02
	4.	Gedung/Bangunan	99.84	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	5.	Sarana dan Prasarana sesuai standar	80.60	100.00	1.24	1	Efisien	0.24